

# ANALISA PENYERANGAN MAPOLSEK KEDUNG REJA DAN MAJENANG JAJARAN POLRES CILACAP OLEH WARGA MASYARAKAT

Oleh : Letkol. Pol. Drs. Anwari Hilmy

## PERMASALAHAN

Pada era sebelum gelombang reformasi melanda tanah air, dan kebrutalan massa mulai marak ditujukan pada Markas Kesatuan Polri dari tingkat Polsek, Polres sampai dengan Polda (lebih kurang 80 Mako), ditingkat Mabes Polri dalam mengantisipasi peningkatan suhu politik menjelang pemilu 1997, telah menerbitkan Petunjuk Lapangan No. Pol : JUKLAP/13/III/1997 tanggal 26 Maret 1997.

Dalam mensikapi maraknya serangan Mako Polri, beberapa TR Kapolri juga telah dikirimkan sebagai arah tindakan yang hakekatnya mengingatkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh JUKLAP/13/III/1997, namun setiap saat masih saja terjadi pengrusakan Mako Polri, yang tidak dipertahankan secara optimal.

Juklap tersebut diterbitkan mengingat Mako Polri dari tingkat Polsek sampai Markas Besar adalah kawasan yang merupakan tempat dan



*pusat pelaksanaan tugas Polri sebagai pengembalian kedaulatan dan kekuasaan negara di bidang hukum, terdiri dari Bangunan, Personel Material dan dokumen serta segala sesuatu yang ada didalamnya (termasuk kategori Markas Katuan Kewilayahan, penyerangan/pengrusakan Mako Polri jelas-jelas mengganggu kehormatan, kewibawaan dan Kekuasaan maka Negara perlu diamankan,*

dipertahankan dan ditangkal serta ditanggulangi.

Penyerangan secara fisik yang merusak dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu Markas Kepolisian RI, merupakan tindak pidana yang melanggar pasal-pasal: 170, 187, 200, 406, 410 KUHP, dan bila dikaitkan dengan penyajian Markas Kepolisian merupakan bagian Integral Negara yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum, maka serangan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Subvrsif (Pasal : 1 ayat (1) angka 3 dan 4 pasal 4 huruf d dan e No. II/PNPS/63.

Tindakan mengamankan dan mempertahankan Markas Kepolisian RI pada prinsipnya, dilakukan "sampai Titik Darah Penghabisan" secara Obyektif, Proporsional dan Profesional. Sedangkan tindakan Represip, harus berdasarkan pertimbangan yang layak berdasarkan situasi/keadaan yang memaksa serta keselarasan berdasarkan hukum. Yang harus dilakukan sesuai tindakan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 49, 50 dan 51 (1) KUHP, hal tersebut ditekankan oleh Kapolri pada kesempatan Press Release maupun pengarahan pada anggota akhir-akhir ini.

## FAKTA-FAKTA

### Sebelum Era Reformasi

Catatan yang menggores kewibawaan Mako Polri dari waktu ke waktu dapat terbagi dalam 3 (tiga)

latar belakang penyebab, brupa teror Eka dan Eki, penyerbuan satuan / oknum TNI dan fluktuasi rasa tidak puas masyarakat terhadap pelayanan Polri. Beberapa kasus besar tercatat antara lain :

Tahun 1979, Polsek Cicendo diserang kelompok Warman dengan aspirasi islam Jamaah yang mempunyai Link up dengan Warsidi di daerah Lampung melakukan penyerangan, pembantaian dan pencurian Senjata Api, mengakibatkan korban Prajurit Bhayangkara yang bertugas meninggal dunia dan beberapa senpi Inventaris dinas Polsek hilang.

Tahun 1984, Polres Jakarta Utara, diserang massa dengan motif meminta pembebasan masyarakat Islam yang ditahan berkait denan kasus Amir Biki di Tanjung Priok mengakibatkan korban jiwa cukup banyak.

Tahun 1989, Polsek Iducut Polres Aceh timur dibakar massa yang kemudian diketahui provokatornya adalah Camat setempat, kemarahan massa disusul adanya kecurigaan warga terhadap perilaku anggota yang dituduh melakukan pelehan seksual terhadap wanita penduduk desa yang datang ke Mapolsek untuk melapor.

Tahun 1992 Polres Nabre/Irian Jaya diserang oknum satuan Bathalyon Infrantri setempat, karena permasalahan pribadi antar anggota dan berkembang menjadi satuan.

## **Pada Era Reformasi**

Kapolri dalam Press Release tanggal 13 Januari 1999 di Surabaya menjelaskan terjadi 80 kasus penyerangan terhadap Markas Kesatuan Polri selama Era Reformasi, beberapa kasus tercatat diantaranya terjadi di jajaran Polres Cilacap yaitu Polsek Kedung Reja dan Polsek Majenang yang mempunyai karakteristik.

### **Letak Geografis**

Polsek Kedung Reja, berjarak lebih kurang 75 Km dengan waktu tempuh (jalan darat) selama 1 1/2 jam dari Polres Cilacap, sedangkan Polsek Majenang lebih kurang 80 Km dengan waktu tempuh 2 jam dari Polres Cilacap dan 1 1/2 jam dari Polwil Banyumas di Purwokerto.

### **Sosial Budaya**

Masyarakat bersifat homogen mayoritas Petani dan beragama Islam.

### **Sosial Ekonomi**

Masyarakat Kedung Reja tidak berada pada potensi wilayah yang subur, sehingga mayoritas Petani perladangan dan buruh tani, sedangkan masyarakat Majenang, disamping potensi wilayah yang subur untuk lahan pertanian, kebiasaan berdagang menjadi alternatif masa keseharian untuk mendukung kemakmuran ekonomi.

## **Sosial Politik**

pada era sebelum orde baru daerah Kedung Reja merupakan daerah cukup kuat sebagai basis Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Majenang merupakan basis DI/TII untuk daerah Cilacap.

### **Latar Belakang Penyerangan Mapolsek Kadung Reja**

#### **Aksi Massa.**

Masyarakat Ciklapa Kecamatan Kedung Reja kabupaten Cilacap lebih kurang 500 orang meminta Polsek penyerahan 2 (dua) orang tahanan pelaku pencurian pupuk tablet (lebih kurang 50 kg), yang dijanjikan pihak orang tua akan diserahkan ke Desa Ciklapa.

Dalam rangka perlindungan terhadap Hak Asasi tersangka dan menghinari tindakan ilegal, tuntutan tidak dipenuhi, guna mengantisipasi kegusaran warga yang menunjukkan gelagat bertindak brutal, kedua tersangka dikirim ke Polres Cilacap, selang 3 1/2 jam usai perundingan dengan Bataud Polsek di Balai Desa masyarakat menuju Polsek, Namun antisipasi Kapolres mengrahkan Ton Dalmas dan UPS Mapolres sudah tiba di Mapolsek dan mampu mengendalikan massa satu jam berikutnya.

Negosiasi tokoh masyarakat dengan Kapolsek tidak menghasilkan

kesepakatan, sehingga masyarakat kembali mendatangi Polsek, pukul 20.30 masyarakat yang menunggu kesediaan Polri menyerahkan tahanan mulai melempar bangunan mengakibatkan : 2 (dua) buah kaca jendela pecah diperkirakan arah pelemparan langsung daridepan Mapolsek (letak bangunan Koramil).

### **Pembubaran Massa**

Pukul 21.15, massa dapat dibubarkan dan tidak terjadi perkembangan aksi massa selanjutnya sampai penelitian dilakukan tanggal 16 Januari 1999.

Pembubaran massa dilaksanakan sesuai prosedur dengan taktik Pam Mako berupa :

★ Mematikan Lampu penerangan Mako.

Tembakan peringatan dilakukan beberapa kali, masyarakat panik dan langsung membubarkan diri

Guna menghindari Under Estimate, selama 10 hari Topn Dalmas/UPS Polres dan Brimob ditempatkan di Mapolsek.

### **Kondisi Mapolsek**

Kondisi umum : Jumlah Personil 17 orang.

Kapolsek : Berpangkat Letda, lulusan Stukpa, bertempat tinggal sementara di ruang Kantor.

Perumahan : Tidak tersedia Rumdin, 7 (tujuh) anggota tinggal pada kota Kecamatan dan 10 anggota

diluar kecamatan.

Ranmor : 4 (empat Sepeda Motor Dinas, 1 (satu) diantaranya rusak berat.

Senpi : 2 senpi jenis SKS dan Revolver dengan amunisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam.

bangunan : Non standar, pengadaan Swadaya, Luas 6 X 12 m, berlokasi disamping kantor Camat dan berhadapan dengan KORamil di tepi jalan Kecamatan.

### **Latar Belakang Penyerangan Mapolsek Majenangan**

#### **Aksi Massa**

Masyarakat Padang Jaya Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap sebanyak lebih kurang 1.000 orang, pada hari minggu tanggal 27 Desember 1998 malam hari pukul 23.00 melakukan unjuk rasa di Mapolsek, menuntut agar seorang tahanan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang anak perempuan berusia 11 tahun dari desa setempat meninggal dunia.

Negosiasi dilakukan oleh 4 (empat) perwakilan dengan Kapolres (yang saat ini berada di Majenang dalam rangka penerimaan Kunker Kapolda Jateng), didalam negosiasi tidak diperoleh kesepakatan karena masyarakat tetap pada tuntutan nya agar pihak Kepolisian menyerahkan tersangka kepada warga.

Pukul 24.00, masyarakat dapat dibubarkan, namun pada hari Senin

tanggal 28 Desember 1998 pukul 22.15 sebanyak lebih kurang 3000 warga kembali berniat melakukan unjuk rasa ke Polsek yang berasal dari 3 (tiga) desa masing-masing Padang Jaya, Celopadang dan Padang Sari, massa dapat dihadang ditengah jalan sehingga tidak sampai di Mapolsek, penyerangan berupa lemparan batu dan meneriakkan yel-yel "Polisi pateni (bunuh), Polsek Bakar!"

### **Pembubaran Massa**

Kebrutalan massa semakin memuncak saat berada di depan rumah Kapolsek lebih kurang 50 m dari Kantor Samsat dan Mapolsek, sehingga Kapolres memerintahkan penembakan peringatan, karena masyarakat tidak mundur, dilanjutkan dengan penembakan gas air mata dan peluru karet, pukul 23.30 massa dapat dibubarkan.

Penangkapan 3(tiga) provokator dan mengungkap terjadinya Rusmas diawali dengan rapat persiapan gerakan yang dilakukan oleh 16 orang dirumah seorangwarga denan kesempatan sasaran aksi massa berbentuk pembakaran Polsek dan rumah 2 (dua) anggota Polsek.

Korban materiil berupa kerusakan ringan pada kaca nako, kantor samsat dan rumah dinas Kapolsek serta beberapa genteng pecah.

13 (tiga belas) pelaku pelemparan ditangkap dan diperiksa, tidak ditahan.

Guna menghindari Under Esti-

mate 1 SSR UPS Polres Cilacap dan 1 SST pasukan Brimob Polwil Banyumas ditugaskan ke Polsek Majenang selama 15 hari.

Pemulihan situasi dilakukan pertemuan antara Kapolres Cilacap dengan Muspika Majenang serta tokoh serta warga desa Padang Panjang.

### **Kondisi Mapolsek**

Jumlah Personel : 43 (empat puluh tiga) anggota, dengan status 21 (dua puluh satu) anggota organik, 22 (dua puluh dua) anggota BKO yang bertempat tinggal di Asrama.

Kapolsek berpangkat Lettu Pol Lulusan Secapa.

Perumahan Dinas memiliki kapasitas yang dihuni oleh 4 KK dan 22 anggota bujangan, rumdin Kapolsek terletak lebih kurang 50 m dari Mapolsek.

Ranmor 4(empat) buah sepeda motor layak pakai.

Senpi 10 (sepuluh) Muoser dan 10 SSK khusus untuk 10 pucuk SSK disiapkan, peluru hampa dan karet disamping peluru tajam.

Bangunan Mapolsek cukup baik dengan halaman belakang sangat lebar dan terbuka.

### **Faktor Yang Mempengaruhi**

#### **Waktu Terjadinya Unjuk Rasa**

Situasi aksi massadan kerusuhan massa pada kedua polsek terjadi pada petang dan malam hari merupakan faktor yang menguntungkan bagi

satuan PHH untuk membubarkan massa.

Tindakan tegas dan disiplin tindakan pada penanggulangan unjuk rasa di kedua Polsek didasarkan dengan perintah tegas dari Kapolres untuk menindak massa secara persuasif terlebih dahulu dan tindakan keras sesuai prosedur dengan tahapan:

Tembakan peringatan

Pelemparan gas air mata

Penembakan peluru karet

### Dukungan dana Opsnal.

Penanggulangan huru-hara merupakan Kontijensi yang sudah dapat diperkirakan dapat terjadi, namun tidak dialokasikan sebagai dana rutin operasional Polres, sehingga satuan setingkat Polsek masih dibebani dengan pencarian dana Opsnal, sedangkan biaya tersebut cukup besar, bagi satuan setingkat Polsek. (lebih kurang 3 juta rupiah untuk Polsek Kedung Reja dan 3 1/2 juta rupiah untuk Polsek Majenang).

Dalam penanggulangan awal Polsek mencukupi kebutuhan dana Opsnal tersebut untuk selanjutnya mengajukan ke Kapolres.

Polres berdasarkan pengajuan tersebut akan mencukupinya.

## KAJIAN / ANALISIS

### Historis Penyerangan Terhadap Polri

Dari semua peristiwa

penyerangan terhadap kewibawaan Polri, belum dilakukan Inventarisasi/terhimpun dalam bentuk "Anatoni of Crime", pola penanggulangan maupun penyelesaiannya secara tuntas.

Dengan mengkaji himpunan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sesungguhnya dapat dikaji pengaruh Situasional, Kondisi pelayanan Polri, maupun penyebab lain yang menyebabkan terjadinya penyerangan.

Karena tidak adanya himpunan data tersebut maka tidak pula diperoleh pola yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi satuan kewilayahan untuk mempedomani gelagat situasi yang mengarah terjadinya penyerangan terhadap Polri serta "Juris Prudensi" bagi Kasatwil yang dinilai tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus penyeangan Marka Polri, maupun tuntutan terhadap pelaku penyerangan dalam penyelesaian secara hukum.

### Kualifikasi Penyebab penyerangan terhadap Polri

Secara umum terdapat 4 (empat) penyebab yang menimbulkan tindakan penyerangan terhadap kewibawaan Polri yaitu : Perwujudan dari Fluktuasi Kejengkelan masyarakat terhadap sikap/perilaku pelayanan Polri, sikap arogan unsur ABRI lain khususnya TNI/AD dan aksi golongan esktrim untuk menunjukkan keberadaannya, maupun keperluan memperoleh senpi maupun amunisi

dan alat Komunikasi Radio.

### **Fluktuasi Rasa tidak puas masyarakat**

Aksi massa yang diawali dengan unjuk rasa dan berkembang menjadi kerusuhan massa berupa penyerangan Markas Polri antara lain disebabkan :

Tuntutan membebaskan tahanan dengan tujuan :

Tahanan yang akan dihakimi sendiri oleh massa.

Tahanan yang diperjuangkan kebebasannya karena dianggap sebagai "Pahlawan" massa tidak pantas untuk dituntut oleh hukum (Provokator Unjuk Rasa).

Loyalitas kelompok masyarakat tertentu :

Pengemudi Ojek/Angkot diperlakukan tidak profesional oleh petugas Polisi Lalu lintas melalui proses penyitaan surat-surat sepeda motor maupun tilang.

Unjuk rasa kelompok massa yang tidak puas dengan hasil dialog oleh petugas Polisi, tiba-tiba berubah menjadi pengrusakan markas.

Tahanan yang meninggal dunia di sel tahanan polri, tiak sedikit mengundang penyerangan massa ke Markas Kepolisian meminta pertanggung jawaban Polri.

### **Penyerangan oleh Oknum Satuan ABRI**

Karena pertandingan yang awalnya ditujukan untuk keakraban

integrasi antar anggota ABRI tidak "Fair Play" atau ejekan antar sporter yang menyinggung kehormatan Satuan, berubah menjadi ajang perkelahian dan berkembang menjadi penyerbuan Markas.

Penyelesaian masalah umumnya dilakukan melalui "Perdamaian" dengan cara Silaturahmi, atau briefing Komandan seara gabungan, tidak menimbulkan aspek jera sehingga masih saja berulang terjadi.

Penyelesaian semacam itu menimbulkan kesan bila pelanggaran hukum dilakukan secara bersama melibatkan orang banyak, penyelesaiannya diluar prosedur hukum, sehingga kemungkinan kesan ini yang memberikan Inspirasi masyarakat berani melakukan penyerangan Markas Polri beramai-ramai.

### **Penyerangan oleh Kelompok Ekstrim.**

Kelompok Ekstrim Warman dan Warsidi, dalam usaha memperoleh senjata api menyerang Polsek dan membunuh anggota jaga, disamping bertujuan memperoleh senpi dan amunisi, juga terkandung maksud menterir masyarakat, dan secara politik nasional dan Internasional menginsyaratkan tentang keberadaannya.

Di daerah-daerah operasi seperti halnya Aceh, Irian Java dan Timor Timur, kasus seperti ini sering terjadi.

---

## **"Pertahanan Markas dilakukan sampai titik darah penghabisan"**

---

### **Penanggulangan Penyerangan**

Penanggulangan penyerangan terhadap Markas Kesatuan Polri, telah diatur dalam Juklak Kapolri No. 13/II/1997 tentang Penanggulangan penyerangan terhadap Markas Polri.

Dalam Juklak tersebut telah ditetapkan *"Pertahanan Markas dilakukan sampai titik darah penghabisan"* oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH Berkali-kali mengingatkan untuk mempertahankan Mako secara optimal dan sampai titik darah penghabisan, hal tersebut dilakukan mengingat tindakan massa semakin berani dan tercatat lebih 80 kasus penyerangan Markas terjadi pada Era Reformasi.

Diperoleh 3 kategori penanggulangan penyerangan Markas Polri sehingga para penyerang mundur.

Penindakan yang ragu-ragu karena tindakan keras tidak mungkin dilakukan karena tidak sesuai prosedur, hal ini disebabkan antara lain :

- Tidak tersedia senpi yang cukup
- Tidak tersedianya peluru hampa
- Tidak tersedianya gasair mata
- Tidak tersedianya peluru karet

Penanggulangan seara ragu-ragu berakibat terjadinya pengrusakan dan

pembakaran Markas.

melarikan diri dari Markas karena merasa ketakutan massa tidak seimbang dengan kekuatan yang ada.

### **Penindakan terhadap pelaku**

Penindakan berbagai kasus penyerangan secara rinci belum terinventarisir, namun umum dapat digolongkan pada beberapa bentuk penyelesaian berupa :

Penindakan hukum dengan mengusut para pelaku ke sidang pengadilan tanpa diikuti dengan tuntutan ganti rugi.

Secara kompromi, saling memaafkan, ditindaklanjuti dengan acara bersifat mengakrabkan.

Memeriksa beberapa pelaku, namun tidak tuntut diselesaikan secara hukum, dengan diprakarsai oleh para pemuka masyarakat dan pejabat daerah permasalahan dianggap selesai.

Sangsi dan Peghargaan bagi Kasatwil :

Prestasi dari para Kasatwil yang secara tepat mempertahankan Markas dari serangan massa memang belum diatur memperoleh penghargaan apalagi tanda jasa, walaupun memang merupakan tindakan tersebut tidak berdasarkan pamrih, tetapi atas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

bagi Kasatwil yang gagal mempertahankan Mako tidak otomatis memperoleh sangsi Jabatan, sehingga



---

Prestasi dari para Kasatwil yang secara tepat mempertahankan Markas dari serangan massa memang belum diatur memperoleh penghargaan apalagi tanda jasa, walaupun memang merupakan tindakan tersebut tidak berdasarkan pamrih, tetapi atas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

---

para Kasatwil mencari jalan "Safety Player" atau tumbuhnya metafor (Kiasan) yang *Easy going* dengan istilah "Euweuh Pengaruhna"

Dukungan Operasional Penanggulangan Penyerangan Markas Pertahanan Markas yang dilakukan secara berhasil memerlukan dukungan operasionalnya cukup besar, mencakup tindakan pertama berupa negosiasi, pertahanan, back up kekuatan dan prosedur tindakan yang melibatkan personil cukup besar (SST s/d SSK) dengan waktu penugasan yang cukup lama.

Namun walaupun penyerangan Mako apada Era Reformasi termasuk dalam satu bentuk Kontijensi bagi satuan kewilayahan, namun dukungan anggaran belum teralokasikan pada Satker Polres. Tak apalagi ditingkat polsek yang dalam kenyataannya merupakan Markas Polri. Satuan kewilayahan, namun dukungan anggaran belum teralokasikan pada Satker/Polres/Ta

apalagi ditingkat Polsek yang dalam kenyataannya merupakan Markas Polri yang banyak menjadi sasaran penyerangan.

Demikian juga tentang pendistribusian Senpi dan Amunisi yang diperlukan guna melakukan penanggulangan sesuai dengan prosedur tindakan, belum tersedia secara merata di setiap Mapolsek, khususnya yang menyangkut peluru hampa, gas air mata dan peluru karet, pada umumnya Polsek hanya tersedia peluru tajam yang jumlahnya sangat terbatas.

## PENUTUP

### Kesimpulan yang dapat ditarik.

Tindakan Polres Cilacap mem-backup Polsek Kedung Reja dan Polsek Majenang mengeahkan SST Dalmas dan Brimob Polwil Banyumas dalam waktu relatif cepat serta kehadiran langsung Kapolres dan Kapolwil dengan memberikan perintah yang tegas dapat menggagalkan penyerangan Mako an berhasil meminimise resiko maupun kerugian jiwa dan harta benda.

Walaupun dana Operasional belum teralokasikan sampai dengan tingkat Polret, namun melalui upaya kemitraan Kapolsek dapat mencukupi dukungan Logistik berupa makan pasukan yang selanjutnya dana tersebut dicukupi dari Kapolres sesuai pengajuan kebutuhan dari Polsek.

---

**Petunjuk Lapangan Kapolri Nopol : Juklap/13/III/1997** hendaknya diterapkan secara Konsekwen dan diikuti tindakan pengawasan yang dapat menjadi dasar pentapan resiko jabatan bagi para Kasatwil yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam pengamanan Markas dari serangan massa.

---

### Solusi yang disarankan

Guna mengantisipasi meningkatnya suhu politik menghadapi pemilu 1999 dalam ERA Reformasi yang masih akan diwarnai oleh aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa maka penerapan Petunjuk Lapangan Kapolri Nopol : Juklap/13/III/1997 hendaknya diterapkan secara Konsekwen dan diikuti tindakan pengawasan yang dapat menjadi dasar pentapan resiko jabatan bagi para Kasatwil yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam pengamanan Markas dari serangan massa.

Kelengkapan peralatan berupa senpi ditiap penjagaan Markas khususnya Polres dan Polsek perlu distandarisasikan jumlah serat jenisnya dan melengkapinya dengan penyediaan peluru hampa, gas air mata, peluru karet dan peluru tajam. Hal ini diperlukan agar tindakan pengamanan Markas dilakukan sesuai prosedur.

Sera khusus peluru karet hanya digunakan untuk Senpi SKS, namun

dari uji coba peluru karet dapat dibuat dari peluru-peluru biasa/tajam dengan mengganti proyektil logam dengan proyektil dari bahan karet yang dilakukan secara manual menggunakan peralatan tang serta press besi.

Dukungan anggaran bagi pasukan back-up dari satuan atas ke Polsek hendaknya menjadi tanggung jawab langsung para kapolres/Ta sehingga tidak membebani para Kapolsek/Ta yang bukan Satker.

Perlu dilakukan inventarisasi kasus penyerangan Markas Polri dalam satu dokumen yang memuat penjelasan tentang anatomi of Crime, upaya penanggulangan, penyelesaian tuntas serta rehabilitasi situasi yang terganggu menjadi normal kembali. Dokumen ini dapat menjadi bahan referensi para Kasatwil.

Walaupun belum dapat dibuktikan namun pelemparan batu oleh massa ke Mapolsek Kedung Reja mengakibatkan pecahnya kaca jendela dan diduga datang dari sudut 180 derajat (lurus arah depan) tepat dari arah Kantor Koramil, dimana saat terjadinya penyerangan beberapa anggota Koramil berada di Kantornya, maka Kasatwil perlu mencermati aparat teritorial mengingat ditemukannya beberapa kasus yang melibatkan provokator dari oknum teritorial.\*\*\*